

**IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANJUT USIA
DI PUSKESMAS MERANTI KECAMATAN MERANTI
KABUPATEN LANDAK**

Oleh :

NURLELI^{1*}

NIM : E1012171020

Rusdiono^{2*}, Rasidar^{2*}

*Email : nurleli10@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak. Berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan dalam observasi yakni dalam penyampaian informasi mengenai posyandu lanjut usia belum optimal dilaksanakan, sehingga banyak masyarakat khususnya lansia yang belum mengetahui dan memahami posyandu lansia. Pada sumber daya manusia belum memadai sehingga staff mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dan membuat pelayanan tidak efektif, pada sumber daya anggaran masih terbatas, kehadiran lansia pada kegiatan posyandu masih rendah, serta pelayanan Lima meja yang belum diterapkan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di dukung dengan teori Edward III (dalam Widodo, 2012:97) yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti kabupaten Landak dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang meliputi transmisi dimana pada proses penyampain informasi mengenai posyandu lansia belum berjalan secara efektif kurangnya minat dan partisipasi lansia dalam menghadiri posyandu, selain sosialisasi yang tidak optimal dilaksanakan pemahaman lansia tentang posyandu juga masih kurang. Sumber daya yang meliputi sumber daya anggaran yang masih terbatas karena hanya bersumber pada dana Desa setempat, untuk faktor disposisi sudah cukup baik para kader telah menunjukkan sikap yang sopan, ramah, dan peduli kepada lansia. Pada faktor struktur birokrasi mekanisme penggunaan 5 (Lima) meja belum diterapkan sehingga pelayanan menjadi tidak efektif karena adanya penggabungan antara tiap meja serta kurangnya fasilitas yang dimiliki seperti meja dan kursi. Saran bagi instansi terkait yakni peningkatan sosialisasi mengenai program posyandu lanjut usia di lingkungan masyarakat, memenuhi sumber daya yang masih kurang baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, standar operasional prosedur yang ada dalam buku pedoman perlu dipertegas.

Kata kunci : Implementasi, Program, Posyandu Lanjut Usia

**THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED HEALTH CENTER PROGRAM
FOR THE ELDERLY IN THE PUBLIC HEALTH CENTER OF MERANTI IN
MERANTI SUB DISTRICT, LANDAK REGENCY**

By:

NURLELI*

NIM : E1012171020

Rusdiono^{2*}, Rasidar^{2*}

***Email : nurleli10@student.untan.ac.id**

1. *Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura*

ABSTRACT

This research aims at describing factors influencing the implementation of the integrated health center for the elderly in the Public Health Center of Meranti, in Meranti Sub-district, Landak Regency. The research conducted a pre observation and found that the socialization of information about the integrated health center for the elderly has not worked well, so that many people especially the elderly did not notice and understand this program. The human resources were considered inadequate leading the staff to work on more than one task, which made the service ineffective. In addition, the financial resource was also limited, the elderly attendance during the program was low, and the Five-table service was not yet implemented because of limited facilities. This research used a descriptive research method with a qualitative approach. It was supported by the theory of Edward III (cited in Widodo, 2012:97) consisting of four variables such as communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. Results of the research indicated that the implementation of the program of the integrated health center in the Public Health Center of Meranti was affected by communication factors. It covered a transmission where the process of information delivery about the integrated health center for the elderly has not worked effectively. As a result, the elderly's willingness and participation to attend the health center were minimal. Beside a lack of socialization, the elderly also had a lack of understanding about the service in the health center. Further, the financial resource was limited because it was only taken from the Village fund source. Meanwhile, the disposition was considered good enough as the staff has shown good attitude, been friendly, and caring to the elderly. Finally, in the bureaucracy structure factor, the health center has not operated the five-table program making the service ineffective as a result of a merger between each table. Besides, the health center did not have sufficient facilities, such as tables and chairs. This research recommends in-charged stakeholders to improve the quantity of socialization about the integrated health center program for the elderly in the neighborhood. In addition, the stakeholders should suffice the resources, both the human and financial resources. Finally, the standard operating procedures in the guide book should be reiterated.

Keywords : *Implementation, Program, Integrated Health Center for the Elderly*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Lanjut usia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir fase kehidupan dan biasa lansia disebut lansia ketika memasuki usia 60 tahun. Kelompok masyarakat yang dikatakan lansia akan terjadi suatu proses penuaan, perubahan yang terjadi meliputi perubahan fisik, biologis, ekonomi, maupun peran sosial di masyarakat. Seringkali lansia dan orang sekitarnya tidak dapat menerima perubahan dan kemunduran yang terjadi sehingga menimbulkan masalah pada lansia seperti penelantaran.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Upaya Meningkatkan dan Memelihara Kesehatan Masyarakat termasuk Lanjut Usia dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dasar dibentuknya Program Posyandu Lanjut Usia berasal dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Komnas Lansia sebagai lembaga semua unsur terkait dalam bidang peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia ditingkat pusat.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun

2017 pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: “Upaya peningkatan lanjut usia meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan hukum”.

Posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan Pemerintah melalui pelayanan kesehatan untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati dan digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang penyelenggaraannya melalui program Puskesmas dengan melibatkan peran serta lansia, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial.

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak, kegiatan pada program posyandu lansia di Puskesmas Meranti dilaksanakan satu kali dalam sebulan dengan bentuk pelayanan yang diberikan berupa pelayanan Kesehatan yakni pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah dengan tensi meter, pemeriksaan status gizi, dan penyuluhan kesehatan, untuk kegiatan tambahan yakni pemberian makanan tambahan.

Berdasarkan data dari Puskesmas Meranti jumlah lansia yang terdaftar pada tahun 2021 yakni 417 orang yang terdiri 208 orang lansia laki-laki dan 209 orang lansia perempuan. Namun, lansia yang mengikuti kegiatan posyandu disetiap bulannya pada tahun 2021 paling banyak berjumlah 56 orang dan paling sedikit berjumlah 12 orang. Hal ini, menunjukkan bahwa kehadiran lansia pada kegiatan posyandu masih rendah dan tidak sebanding dengan jumlah lansia yang terdaftar.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan menjadi penyebab dari lansia yang tidak memahami maksud dan tujuan dari posyandu. Sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun menyebabkan banyak lansia yang tidak terpapar secara keseluruhan mengenai adanya program posyandu lansia. Kurangnya kehadiran lansia pada kegiatan posyandu menjadi penghambat dalam implementasi program posyandu lansia.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyuluhan secara langsung dalam pemberian informasi kepada masyarakat lansia mengenai posyandu lanjut usia belum terlaksana dengan optimal

2. Sumber daya anggaran yang terbatas
3. Sumber daya manusia/staff yang tidak memadai
4. Rendahnya persentase kehadiran pada posyandu lanjut usia
5. Sistem administrasi belum bisa menerapkan lima meja melainkan tiga meja

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ketidakberhasilan Posyandu Lanjut Usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Mengapa Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia di Puskesmas Meranti Kabupaten Landak belum berhasil?”

5. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak, terkait dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai penambahan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik terutama bidang Kebijakan Publik, serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Puskesmas Meranti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pelaksanaan posyandu lanjut usia guna mencapai keberhasilan
- b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti, yang berkaitan dengan penanganan masalah kesehatan lansia agar masyarakat tidak memandang sebelah mata, sehingga masyarakat juga dapat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan agar program posyandu lanjut usia dapat dirasakan manfaatnya secara optimal.
- c. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan serta dapat memantapkan dalam penguasaan

disiplin ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Menurut Frederich (dalam Agustino, 2012:7) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi masalah publik untuk dapat mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Anderson (dalam Agustino, 2012:7-8) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, yakni sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan

yang ditempuh Pemerintah benar-benar Aplikabel dilapangan dan menghasilkan *ouput* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Untuk dapat mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa adanya implementasi maka kebijakan publik tersebut hanya menjadi catatan-catatan semata, sebagaimana yang dipertegakan Udoji (dalam Agustino, 2006:27) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari perbuatan kebijakan.

3. Model-model Implementasi Kebijakan

Salah satu model implementasi yang digunakan dalam menggambarkan fenome dilapangan terkait dengan implementasi program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak yaitu model Edward III (dalam Widodo, 2012:97) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui,

memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para kebijakan dapat mempersiapkan diri dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yakni: dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan implementasi kebijakan. Sumber daya adalah faktor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal diatas kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya meliputi sumber daya manusia (*staff*), sumber daya anggaran, dan sumber daya informasi dan wewenang.

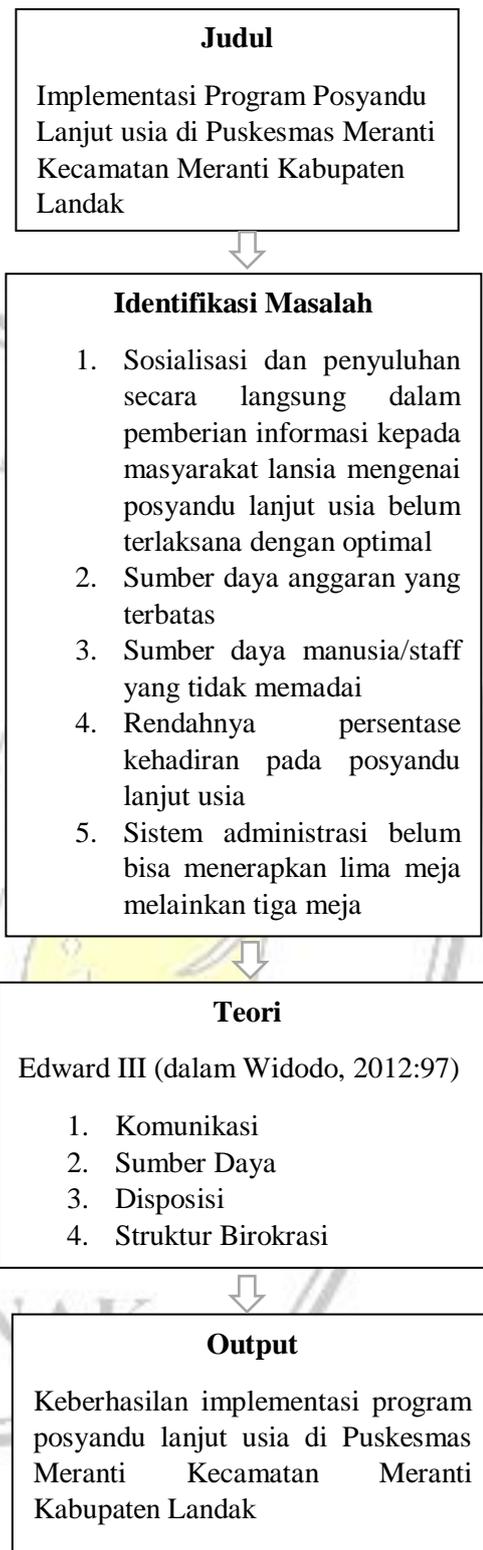
3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dengan adanya pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan maka akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek yang penting dari setiap organisasi adalah adanya operasional tandar prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap pertemuan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan berfungsi untuk menyamakan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan terkenal luas, sehingga dapat menimbulkan komplik yang besar.

Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan sebagaimana mestinya yang berhubungan dengan implementasi program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak. Menurut Maleong (2016:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak. Pertimbangan penulis dalam memilih Puskesmas Meranti sebagai lokasi penelitian didasarkan pada belum optimalnya implementasi program posyandu lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan lansia dalam pelayanan kesehatan karena masih rendahnya tingkat kehadiran lansia pada pelaksanaan posyandu.

Adapun yang menjadi subjek penelitian menggunakan *purposive*, yakni:

1. Kepala Puskesmas Meranti
2. Kepala Desa Meranti
3. Ketua Kader beserta anggota Posyandu Lanju Usia
4. Tokoh masyarakat
5. Lansia yang mengikuti posyandu

Dalam penelitian yang menjadi objek penelitian yakni Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak.

D. HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi merupakan hal yang penting dalam meneruskan pesan dari atas ke bawah atau dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam suatu organisasi. Implementasi program posyandu lanjut usia pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari keputusan Pemerintah mengenai kesejahteraan lansia. Agar implementasi berjalan dengan baik, maka komunikasi sangat diperlukan untuk mengalirkan perintah, petunjuk, serta arahan mengenai pelaksanaan program. Untuk melihat bagaimana jelasnya komunikasi pada pelaksanaan program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti, ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi. Antara lain transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), konsistensi

(consistency).

- a. Transmisi, Pemerintah Desa, Pihak Puskesmas dan Para Kader mendukung adanya program posyandu lanjut usia yang dilaksanakan. Proses penyaluran informasi dari Desa ke Puskesmas sampai kepada para Kader sudah disampaikan dengan sangat jelas melalui pertemuan yang telah dilaksanakan mengenai implementasi program posyandu lanjut usia telah tersalurkan dengan baik kepada pihak implementor meski dilapangan informasi yang disampaikan belum tersalurkan dengan baik kepada masyarakat khususnya lansia mengenai adanya program posyandu. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan di masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak paham dengan program posyandu lansia. Hal tersebut yang menyebabkan implementasi program posyandu lanjut usia belum berhasil.
- b. Kejelasan, informasi yang disampaikan kepada pihak pelaksana kepada implementor sudah sangat jelas melalui pertemuan yang telah dilaksanakan, dalam pertemuan tersebut tata cara pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan sudah disampaikan dengan jelas, hanya saja lansia yang mengetahui bahwa

program posyandu dilaksanakan satu bulan sekali, namun untuk jadwal kegiatannya tidak tetap karena setiap pelaksanaannya selalu berubah tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan yakni setiap tanggal 6. Namun, suatu waktu kegiatan pelaksanaan posyandu lansia dapat berubah. Dengan melihat cara penyampaian informasi mengenai program posyandu lanjut usia yang masih minim mengakibatkan rendahnya partisipasi lansia di posyandu lanjut usia.

- c. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berjalan berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus jelas dan konsisten. Informasi yang telah diterima oleh implementor telah dilaksanakan dan disampaikan dengan konsisten kepada para lansia, yakni kegiatan posyandu lansia dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Dalam hal ini, konsistensi mengenai implementasi program posyandu lanjut usia oleh para kader dan pihak Puskesmas telah terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya

- a. Staff, sumber daya manusia (staff) merupakan sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya

disebabkan oleh manusia yang tidak mencukupi atau memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Dari segi jumlah para kader yang ada di posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti belum cukup memadai sehingga dalam melaksanakan tugasnya kader harus melakukan lebih dari satu tugas, jika dilihat dari latar belakang pendidikan para kader sudah cukup baik, dari segi kualitas dimana para kader memahami tugas dan fungsi mereka di posyandu. Hanya saja untuk jumlah mereka masih kurang memadai, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan dengan jumlah yang ada.

- b. Sumber Daya Anggaran, sumber daya anggaran pada program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti hanya bersumber dari dana Desa setempat. Sumber dana juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan suatu program jika sumber dana yang tersedia masih terbatas maka dapat menyebabkan implementasi dari program tersebut belum berhasil. Tersedianya sumber daya anggaran atau dana untuk melaksanakan posyandu lanjut usia hanya bersumber dari dana Desa, terkait dengan dana tersebut berdasarkan temuan penulis dilapangan bahwa perlu adanya penambahan

anggaran yang diberikan karena anggaran yang telah ada digunakan untuk dua kali kegiatan, setidaknya memerlukan biaya yang lebih supaya tidak adanya kekurangan dari anggaran yang ada.

- c. Sumber Daya Informasi dan Wewenang

Sumber daya informasi dan wewenang yang dimiliki para kader dan pihak Puskesmas dikatakan baik. Informasi digunakan untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang yang terlibat dalam program posyandu lanjut usia agar mereka mau melaksanakan dan mematuhi tugas dan kewajibannya. Informasi yang diperoleh para kader pada saat pertemuan dengan pihak Puskesmas. Terkait dengan kewenangan para kader sudah dikatakan cukup baik dimana mereka turun langsung kelapangan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan informasi yang telah di peroleh yakni kegiatan posyandu dilaksanakan satu bulan sekali.

3. Disposisi

Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukannya tetapi juga

ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Terkait dengan sikap para kader posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti

Kecamatan Meranti Kabupaten Landak memiliki sikap yang baik, sopan, dan ramah dalam memberikan pelayanan, maka dari variabel disposisi dapat dikatakan sudah baik para penerima layanan yaitu lansia merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Terdapat dua dimensi yang menjadi karakteristik dari struktur birokrasi yaitu dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure*).

1. Dimensi fragmentasi

Pada program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kabupaten Landak. Unit-unit organisasi yang bersangkutan yakni Pemerintah Desa, pihak Puskesmas, dan para Kader sudah terkoordinasi dengan baik melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan tiga bulan sekali. Akan tetapi, meskipun antara unit-unit organisasi dalam organisasi sudah

terhubung dengan baik, namun kepada kelompok sasaran masih belum tersampaikan dengan baik.

2. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*)

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harusnya dimiliki para kader dalam melaksanakan program posyandu lansia adalah pelayanan 5 (Lima) meja sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan posyandu lansia. Namun, posyandu lansia di Puskesmas Meranti tidak bisa menerapkan pelayanan 5 (Lima) meja melainkan 3 (Tiga) meja karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Sebenarnya, pelayanan 5 (Lima) meja maupun 3 (Tiga) tidak ada bedanya hanya saja diantara meja tersebut fungsinya digabungkan sehingga pelayanan menjadi tidak efektif. Diantara meja pelayanan yang digabungkan yakni meja pertama pendaftaran, pengukuran, penimbangan, serta pencatatan, dan pengukuran tensi darah. Meja kedua pemeriksaan kesehatan, dan meja ketiga penyuluhan kesehatan dan pemberian makanan tambahan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program posyandu

lanjut usia di Puskesmas Meranti kecamatan Meranti Kabupaten Landak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi transmisi dalam penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh kader kepada masyarakat di Meranti masih kurang maksimal sehingga menjadi salah satu penghambat terlaksananya program posyandu lanjut usia. Sosialisasi yang dilakukan oleh kader belum dikatakan maksimal dimana mereka memberitahu adanya posyandu lansia hanya kepada lansia yang tinggal satu daerah dengan mereka artinya bahwa lansia yang tidak tinggal satu daerah dengan kader kurang mendapatkan informasi.
2. Ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi program posyandu lanjut usia masih kurang dimana ketersediaan *staff* dalam mengelola posyandu lanjut usia masih kurang memadai sehingga satu kader mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Sumber daya anggaran dalam implementasi program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti masih kurang, dimana sumber anggaran yang ada hanya berasal dari dana Desa setempat serta kurangnya sarana yang dimiliki seperti kursi yang tersedia.
3. Para Kader dalam melaksanakan tugasnya memiliki sikap yang menerima dimana para kader dalam memberikan pelayanan kepada lansia sudah baik sesuai dengan prosedur baik, sopan, dan ramah kepada lansia. Setiap lansia yang datang selalu dilayani dengan cepat sehingga lansia tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan.
4. Pada sistem administrasi yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) pada posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak. Belum bisa menerapkan pelayanan lima meja karena keterbatasan meja yang dimiliki, para kader hanya bisa memberikan pelayanan tiga meja. Sebenarnya untuk pelayanan lima meja maupun tiga meja tidak menjadi sebuah permasalahan hanya saja beberapa meja fungsinya harus digabungkan karena keterbatasan meja pelayanan yang dimiliki, sehingga hal tersebut membuat pelayanan para kader menjadi tidak efektif apalagi dimasa pandemi sekarang ini pelayanan lima meja sangat penting diterapkan supaya tidak mengumpulkan massa di setiap meja yang ada.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yakni:

1. Pada proses penyaluran informasi mengenai posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak perlu adanya peningkatan, sehingga lansia secara keseluruhan mendapatkan informasi mengenai posyandu tersebut, sehingga program posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti berjalan sesuai dengan yang diharapkan yakni kesejahteraan lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui posyandu dapat terjangkau secara keseluruhan.
2. Ketersediaan para Kader perlu untuk diperhatikan karena sumber daya manusia merupakan sumber utama dalam setiap program apaun yang diterapkan, untuk itu jumlah dan kemampuan kader pada posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti harus diperhatikan idealnya jumlah dan kemampuan yang dimiliki para kader sangat menjadi pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan posyandu lanjut usia.
3. Sikap menerima para Kader dalam menjalankan tugasnya merupakan sikap yang baik dimana mereka telah

memberikan pelayanan yang baik kepada lansia sehingga ada kesan yang baik pula dari lansia. Sikap seperti itu harus dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan.

4. Sistem administrasi yakni pelayanan lima meja pada posyandu lanjut usia di Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak ada baiknya untuk diperhatikan menambahkan fasilitas yang kurang sangat perlu karena jika tidak menerapkan pelayanan lima meja akan berakibat pada penggabungan fungsi pada setiap meja dan hal tersebut akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan posyandu lansia, untuk itu pedoman pelaksanaan posyandu lanjut usia yang sudah ada harus dipertegas kembali.

F. REFRENSI

Buku-buku :

- Wahab, Abdul, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari formulasi kepenyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Samarinda: Bumi Aksara
- Agustinus, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- A.G, Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Budi, Winarno. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian*

- Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan publik dan Transparansi*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Modal-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung
- Agus, Purwanto, Erwan, Ratih Sulistyaastuti, Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Aistyawati, intan. 2016. *Analisis Implementasi Program Kebijakan Santun Lanjut Usia di Puskesmas Mijen Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang. Di akses 15 Maret 2021
<http://lib.unnes.ac.id/28255/>
- Erdika, Sasa. 2015. *Implementasi kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan melalui posyandu lanjut usia dalam aspek sumber daya (Studi tentang program posyandu lansia) di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Di akses 17 Juni 2021
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>

Dokumen :

- Komnas Lanjut Usia. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia*.
- Tim Dosen Fisip. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017 *tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.

Sumber Skripsi/penelitian Terdahulu :

- Ayunita, Aprilyani. 2020. *Implementasi Pos Layanan Terpadu Usia (posyandu lansia) oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan*. Fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan Area Medan. Di akses 15 Maret 2021
<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13016>